



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. HABIBULLAH**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **175739**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.227.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/83 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 90.500.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 265.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS VALCO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TX AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 221.650.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	130.527.599
F. HARTA LAINNYA	Rp.	58.500.000
Sub Total	Rp.	1.903.177.599
III. HUTANG	Rp.	50.493.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.852.684.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.